

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teoretis

##### 2.1.1 Kepemimpinan Kiai

###### A. Definisi Kepemimpinan Kiai

Kepemimpinan diambil dari kata pemimpin yang dalam bahasa Inggris disebut *leader*, adalah orang yang mempunyai anak buah dalam suatu lembaga. Pemimpin dapat diartikan sebagai penggerak utama dalam suatu lembaga pendidikan yang menjadi pemegang utama jalannya organisasi, orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan, dan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi tujuan dan ambisinya. Di samping itu, pemimpin memiliki kepuasan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya<sup>1</sup>. Adapun pengertian kepemimpinan secara umum menurut beberapa tokoh dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Robbin yang dikutip lagi oleh Rohmat, kepemimpinan sebagai *“leadership as ability to influence a group toward the achievement goals”*. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk dapat mencapai tujuan<sup>2</sup>.
- 2) Menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan **organisasi**,

---

<sup>1</sup> Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 194-195.

<sup>2</sup> Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan (Konsep dan Aplikasi), STAIN Press Purwokerto, Purwokerto, 2010, hlm. 39.

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya<sup>3</sup>.

- 3) Menurut Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing sesuatu kelompok sedemikian rupa, sehingga tercapailah tujuan dari kelompok itu<sup>4</sup>.
- 4) Menurut E. Mulyasa kepemimpinan adalah sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi<sup>5</sup>.
- 5) Menurut Irham Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan<sup>6</sup>.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kyai adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing dan membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh seorang alim sekaligus pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya demi Allah serta

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>4</sup> Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 325.

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, (Konsep, Strategi dan Implementasi)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 107.

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Kepemimpinan (Teori & Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 15.

menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.

## B. Dasar Kepemimpinan Kiai

Kyai bukan hanya sekedar pimpinan tetapi sebagai pemilik persantren, pembimbing para santri atau masyarakat sekitarnya dalam segala hal. Selain itu, perlu adanya dasar yang dapat memperkuat dalam kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut:

Asas-asas kepemimpinan ialah:

- 1) Kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan *human*.
- 2) Efisien, efisien teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi, dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi serta asas-asas manajemen modern.
- 3) Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi<sup>7</sup>.

Dasar kepemimpinan dijelaskan pula dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَافِسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلِ ائِي لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَادُّ  
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ ائِي قَالَ ائِي وَتَقْدِسُ بِحَمْدِكَ نُسِيحُ

Artinya :

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan*

<sup>7</sup> 7 Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, cet. Ke-20, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 94

*kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>8</sup>*

Berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan kiai dalam Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.

### **C. Fungsi Kepemimpinan Kiai**

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antarindividu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti:

- 1) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
- 2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugastugas pokok kelompok/organisasi<sup>9</sup>.

### **D. Tipe Kepemimpinan Kiai**

Tipe kepemimpinan pada dasarnya saling isi mengisi atau saling menunjang secara bervariasi, yang disesuaikan dengan stuasinya sehingga akan menghasilkan

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 30, Al-Qur’an dan Terjemahannya di akses dalam <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-30> pada hari Selasa 07 November 2023.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Op. cit., hlm. 34

kepemimpinan yang efektif. Adapun tipe-tipe kepemimpinan kyai diantaranya sebagai berikut:

**a. Kharismatik**

Tipe kepemimpinan kharismatik dibagi dua macam yaitu: *pertama*, kewibawaan alamiah adalah kewibawaan yang telah ada pada diri pemimpin. *Kedua*, kewibawaan buatan, yaitu kewibawaan yang diciptakan oleh jabatan dan kekuasaan<sup>10</sup>.

Sebagaimana data dari jurnal Karsa yang ditulis oleh Edi Susanto Dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan Peserta Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tertulis bahwa melalui kharisma yang melekat padanya, Kyai dijadikan imam dalam bidang *'ubûdiyyah* dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem yang menimpa masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat peran kyai dalam masyarakat, sebab kehadirannya diyakini membawa berkah

Kharisma kyai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu, karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Proses ini mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, sekitar kediamannya, kemudian melebar keluar menuju tempat-tempat yang jauh, seperti kharisma KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah di Jombang, KH. Kholil Bangkalan dan KH.R. As'ad Syamsul Arifin dari Sitobondo dan beberapa kyai lain, terutama mereka yang berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). KH Ahmad Dahlan, KH AR

---

<sup>10</sup> Hikmat, Op. cit., hlm. 258.

Fachrudin, Buya Hamka, Syafii Maarif ( Muhammadiyah ) dan masih banyak lainnya. Kharisma yang dimiliki kyai tersebut dalam sejarahnya mampu menjadi sumber inspirasi perubahan dalam masyarakat.

Dengan kharisma yang dimilikinya, kyai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan Islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan, terutama dalam pesantren. Kharisma yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren<sup>11</sup>.

#### **b. Tipe Paternalistik**

Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang kebabakan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- 2) Bersikap terlalu melindungi (overly protective).
- 3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
- 4) Hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.

---

<sup>11</sup> Edi Susanto, "Kepemimpinan Kharismatik Kyai dalam Perspektif Masyarakat Madura" Jurnal Karsa, vol.XI, 1 April 2007, hlm. 31-32.

- 5) Tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada pengikutnya dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas.
- 6) Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar.

#### **c. Tipe Materialistik**

Tipe ini mempunyai sifat kemiliteran-kemiliteran. Hanya gayanya saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini selaki dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin militeristik antara lain ialah:

- 1) Lebih menggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya, keras sangat otoriter, kaku dan sering kurang bijaksana.
- 2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.
- 3) Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebih-lebihan.
- 4) Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya (disiplin cadaver/mayat).
- 5) Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan dari bawahannya.
- 6) Komunikasi hanya langsung searah saja<sup>12</sup>.

#### **d. Tipe Otoriter**

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, Op. cit., hlm. 81-83

pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah<sup>13</sup>.

#### **e. Tipe Laissez Faire**

Tipe kepemimpinan Laissez Faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dan membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Sebab duduknya sebagai direktur atau pemimpin, ketua dewan, komandan, kepala biasanya diperoleh melalui penyogokan, suapan atau berkat sistem nepotisme. Dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak berdaya sama sekali menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Sehingga organisasi yang dipimpinnya menjadi kacau balau, morat-marit, dan pada hakikatnya mirip satu firma tanpa kepala.

#### **f. Tipe Populistic**

Kepemimpinan populis sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat misalnya Soekarno dengan idealisme marhaenismenya, yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan-penindasan serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing. Kepemimpinan populasi ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Op. cit., hlm. 36.



bantuan hutang-hutang luar negeri (asing). Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali nasionalisme<sup>14</sup>.

#### **g. Tipe Administratif atau Eksekutif**

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator- administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial di tengah masyarakat<sup>15</sup>.

#### **h. Tipe Demokratis**

Tipe kepemimpinan ini dalam pelaksanaannya semua anggota diajak berpartisipasi menyumbang pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang bertipe demokratis adalah yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sumber daya dan kreativitas karyawan.
- 2) Pengembangan partisipatif karyawan.
- 3) Musyawarah dan mufakat.
- 4) Kaderisasi yang sistematis.

---

<sup>14</sup> 8 Kartini Kartono, Op. cit., hlm.84-85.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 85.

- 5) Pendelegasian normatif yang konstruktif.
- 6) Regenerasi kepemimpinan<sup>16</sup>.

#### **E. Model Kepemimpinan Kiai**

Kepemimpinan dalam Islam ada yang disebut wilayatu al-Imam tidak lain merupakan realisasi konkret dari gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah diwajibkan menjadi standar keteladanan bagi semua pemimpin umat Islam. Hal ini berarti, kepemimpinan tidak sekedar dilandasi oleh kemampuan seseorang dalam mengatur dan menjalankan mekanisme kepemimpinannya, melainkan menganggap kepemimpinan lebih dilandasi oleh nilai-nilai spiritual (spiritual value) yang memiliki otoritas keagamaan dimana imam atau pemimpin dijadikan model bagi yang lain. Adapun model kepemimpinan kiai di pondok pesantren yaitu:

- a. Kepemimpinan *religion-paternalistik* di mana adanya suatu gaya interaksi antara kiai dengan para santri atau bawahan didasarkan atas nilai-nilai keagamaan yang disadarkan kepada gaya kepemimpinan nabi Muhammad SAW<sup>17</sup>.
- b. Kepemimpinan *paternalistic-otoriter*, dimana Pemimpin pasif, sebagai seorang bapak yang memberi kesempatan anak-anaknya untuk berkreasi, tetapi juga otoriter, yaitu memberikan kata-kata final untuk memutuskan apakah karya anak buah yang bersangkutan dapat diteruskan atau dihentikan.

---

<sup>16</sup> Hikmat, Op. cit., hlm. 258.

<sup>17</sup> Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan), Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 73.

- c. Kepemimpinan *legal-formal*, mekanisme kerja kepemimpinan ini menggunakan fungsi kelembagaan, dalam hal ini masing-masing unsur berperan sesuai dengan bidangnya, dan secara keseluruhan bekerja mendukung keutuhan lembaga.
- d. Kepemimpinan *bercorak alami*, model kepemimpinan ini kiai tidak membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran yang menyangkut penentuan kebijakan pondok pesantren, mengingat hal itu menjadi wewenangnya secara mutlak. Jika ada usulan-usulan pengembangan yang berasal dari luar yang berbeda sama sekali dari kebijakan kiai justru direspon secara negatif.
- e. Kepemimpinan *kharismatik-tradisional-rasional*, yaitu suatu pola kepemimpinan yang mengacu pada figur sentral dianggap oleh komunitas pendukungnya memiliki kekuatan supranatural dari Allah SWT, kelebihan dalam berbagai bidang keilmuan, partisipasi komunitas dalam mekanisme kepemimpinan kecil, dan mekanisme kepemimpinan tidak diatur secara birokratik, membutuhkan legitimasi formal komunitas pendukungnya dengan cara mencari kaitan geneologis dari pola kepemimpinan kharismatik yang ada sebelumnya, pola kepemimpinan yang bersifat kolektif, di mana tingkat partisipasi komunitas lebih tinggi, struktur keorganisasian lebih kompleks sentra kepemimpinan tidak mengarah atau individu melainkan lebih mengarah pada kelembagaan, dan mekanisme kepemimpinan diatur secara manajerial.

## 2.1.2 Partisipasi Politik

### A. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Suharno Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian” atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambilperanan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi politik menurut Huntington dan nelson adalah hanya sebagai kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah<sup>18</sup>. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Joan Nelson dan Samue l P, 1994. Partisipasi politik di Negara Berkembang.

<sup>19</sup> Cholisin,dkk. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik

## B. Bentuk bentuk Partisipasi Politik

Dalam hal ini Huntington dan Nelson berpendapat banyak hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah partisipasi politik dan apapun caranya, atau dengan kata lain partisipasi politik adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi kegiatan atau keputusan politik. Hal senada juga disebutkan oleh Gabriel Almond, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, pertama partisipasi politik *konvensional* yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Kedua partisipasi politik *non konvensional* yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.<sup>20</sup>

Huntington dan Nelson, membagi bentuk partisipasi politik yaitu : *Pertama* Kegiatan pemilihan yaitu, kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif dan eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. *Kedua Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka suatu isu. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi politik individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. *Ketiga Contacting* yaitu, upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. *Keempat* Tindakan kekerasan yaitu, tindakan

---

<sup>20</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 4.

individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, pemborontakan politik. Yang *kelima* bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi keduanya tidak membendakan apakah tidak individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi legal atau illegal sebab itu, penyusunan, ancaman dan sejenisnya tiap bentuk partisipasi adalah masuk kedalam kajian ini<sup>21</sup>.

Partisipasi politik mempunyai dua macam bentuk, yakni konvensional dan non konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal maupun ilegal<sup>22</sup>. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik integritas kehidupan politik dan kepuasan maupun ketidakpuasan warga negara. Berikut bentuk-bentuk partisipasi politik akan dijabarkan pada tabel dibawah:

**Tabel 2.1**  
**Bentuk – bentuk Partisipasi Politik**

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara ( <i>Voting</i> )	Pengajuan Petisi
Diskusi Politik	Berdemokrasi
Kegiatan Kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung kelompok kepentingan	Mogok

<sup>21</sup> Elopere Samuel, 2017, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga, Hal.3, Diakses pada 10 Agustus 2023

<sup>22</sup> Gabriel A. Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik", dalam Perbandingan Sistem Politik, peny. Mochtar Mas"oed dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 61.

Komunikasi dengan Pejabat Politik dan Administratif	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan,pembakaran) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan) Perang gerilya dan revolusi
---	--

(Sumber : Cholisin.2007:152)

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi sebagai sebuah kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif pasif dan tidak aktif Partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya mempengaruhi proses *input* politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan *output* seperti kegiatan menaati pemerintahan, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah<sup>23</sup> sedangkan partisipasi tidak aktif merupakan tindakan untuk tidak melakukan apa-apa seperti tidak memilih, tidak membayar pajak, tak menaati secara sengaja dan tak menghadiri suatu kampanye politik.

Goel dan Olsen dalam Sastroatmodjo (1995 : 77) menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Menurut mereka partisipasi dibagi dalam enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya pada orang lain), warga negara marjinal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang

<sup>23</sup> Surbakti, Ramlan. 2004. Memahami ilmu politik . Hal 142

melakukan partisipasi politik). Partisipasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi Pertama, partisipasi yang bersifat sukarela (otonom). Kedua, atas desakan orang lain (mobilisasi). Hal ini senada dengan pendapat Nelson yang menyatakan dua sifat partisipasi yakni *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi).

Partisipasi tak aktif ini berbeda dengan tindakan anggota masyarakat yang tak aktif dalam proses politik karena tidak tahu atau tidak mampu. Sedangkan untuk partisipasi politik yang berwujud demonstrasi protes dan tindak kekerasan ini biasanya dipergunakan untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan pemerintah bila bentuk-bentuk aktifitas lainnya tidak bisa dilakukan atau nampak tidak efektif (Mochtar Mas'ood dan Colin Mc Andrews 1997:48)

**Tabel 2.2**  
**Partisipasi Politik Aktif dan Pasif**

		Input	Output
Aktif	Instrumental	Pemilihan Pemimpin Pemerintahan	Menuntut Fasilitas Ekonomi
		Aktifitas dalam Partai Politik	Menuntut Keadilan
		Pembangunan Civil	Mendapatkan Penyelesaian Konflik
Pasif	Ekspresif	Demonstrasi	Simbol Nasional
		Protes	Perasaan Identifikasi
		Debat Politik	Rasa Superior
		Mentaati Hukum	Menjaga Ketertiban Umum
		Membayar Pajak	Menjaga Ketertiban Umum

(Sumber : Ramlan Surbakti 2004:111)

Menurut Ramlan Surbakti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik hal ini dapat dilihat dengan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan kontekstual (lingkungan sosio ekonomi dan politik). Seseorang dalam melakukan tindakan politik dipengaruhi oleh status sosio ekonominya, Indikator dari status



sosial adalah pekerjaan, pendidikan sedangkan indicator dari status ekonomi adalah pendapatan, pengeluaran, pemilikan dan lainnya. Kedua, pendekatan individual-psikologik (non intensional/intensional) pendekatan ini terbagi menjadi dua yang pertama adalah non intensional yaitu lingkungan sosial tidak mempengaruhi perilaku politik secara langsung namun dalam pendekatan ini faktor kepribadian lah yang lebih dominan didalam kepribadian tersebut terdapat kepercayaan, sikap dan lain nya. *Kedua* pendekatan intensional yaitu termasuk didalam adalah teori pembuatan keputusan (*decison making theory*) Budaya Politik

Budaya politik merupakan budaya atas dasar norma yang mengatur sikap, dan pola pemikiran psikologis terhadap masyarakat dalam kehidupan<sup>24</sup>. Budaya partisipasi terfokus kepada orientasi politik. Orientasi politik membahas mengenai pengetahuan, kepercayaan, dan pemahaman seseorang mengenai sistem politik<sup>25</sup>. Secara sederhana budaya politik dapat dipahami sebagai sikap masyarakat terhadap peristiwa politik yang sedang terjadi. Teori budaya politik dalam penelitian ini yaitu untuk melihat sejauhmana budaya politik parokial dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah At Tajdid Tasikmalaya pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

---

<sup>24</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, hal.10.

<sup>25</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, hal.14.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### A. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran untuk memperjelas dalam menentukan variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir secara teoretis akan menjelaskan hubungan antar variabel yaitu perilaku kepemimpinan kiyai & partisipasi politik. Berdasarkan permasalahan didalam penelitian, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

